

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Alat Berat Di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan pembangunan berusaha menggali Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau besar. Pemungutan pajak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pajak untuk kendaraan alat berat di Kalimantan Timur. Berdasarkan pelaksanaan, dianalisis berbagai hambatan yang ada dan dicarikan solusi atas berbagai penghambat tersebut.

Metode pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian berupa data primer yakni wawancara dengan responden di Dispenda dan para pemilik kendaraan alat berat. Data sekunder, dari Undang-undang Perpajakan, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah serta Surat Tagihan Pajak Daerah melalui penelitian kepustakaan sedangkan metode analisis yang dipakai adalah kualitatif.

Pelaksanaan Pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan, terdapat penurunan pemasukan sektor pajak kendaraan bermotor untuk alat berat. Secara hukum, pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak yaitu asas keadilan, asas Yuridis, Asas Ekonomis dan Asas Finansial.

Terdapat beberapa faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur, yaitu : Faktor dari sisi hukum yang terbagi menjadi dari substansi hukum dan struktur. Kedua, Faktor penghambat dari sisi teknis serta faktor penghambat dari sisi wajib pajak.

Dalam rangka mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur, diperlukan upaya yaitu mengatasi hambatan yang berasal dari faktor dari sisi hukum yang terbagi menjadi dari substansi hukum dan struktur. Kedua, mengatasi hambatan yang berasal dari faktor dari sisi teknis serta mengatasi hambatan yang berasal dari faktor dari sisi wajib pajak.

Kata Kunci : Tinjauan hukum, pemungutan pajak kendaraan bermotor alat berat.

ABSTRACT

Legal Review toward the Implementation of Tax Collection of Motor Vehicle for Heavy Equipments in East Kalimantan. In the effort of supporting the development of the country, the government of East Kalimantan Province has tried to expand the Native Local Income (*Pendapatan Asli Daerah*) from the Tax Collection sector of Motor Vehicle for Heavy Equipments. The tax collection itself has been regulated in the Regional Rule of East Kalimantan Number 1 Year 2011 about Local Income of East Kalimantan Province. The purpose of this research is to study and evaluate the implementation of tax collection of motor vehicle for heavy equipments in East Kalimantan. Based on the implementation, then it would be analyzed several related obstructive factors and be solved by using appropriate solutions.

The methodological of this research is Juridical Empirical. And, the specification of this research is descriptive analytical. The research data collected as primary data are interviews of the Authority of Local Income (*Dinas Pendapatan Daerah*) and the owners of motor vehicle for heavy equipments. As for the secondary data, the data are collected through literature reading of Indonesian Tax Regulations, Regional Rules of East Kalimantan Province about Local Income and Local Retribution, the Letter of Tax Assessment of Local Income as well as the Letter of Tax Claim. The analysis method of this research is qualitative.

Implementation of Tax Collection of Motor Vehicle for Heavy Equipments in East Kalimantan has been regulated in the Regional Rule of East Kalimantan Number 1 Year 2011 about Local Income of East Kalimantan Province. Based on the implementation of the tax collection, there is decreased amount of the income. By law, the Implementation of Tax Collection of Motor Vehicle for Heavy Equipments in East Kalimantan is accordance with the principle of taxation there are principle of justice, principle of juridical, principle of financial and principle of economic.

There are some inhibiting factors in the the Implementation of Tax Collection of Motor Vehicle for Heavy Equipments in East Kalimantan, that are factor of the law, factor in term of technical and factor of the taxpayer.

In order to overcome the barriers the Implementation of Tax Collection of Motor Vehicle for Heavy Equipments in East Kalimantan, efforts are needed to overcome the obstacles that come from the legal side, from the technical side and from the taxpayer.

Keyword: Legal Review, The Implementation of Tax Collection of Motor Vehicle for Heavy Equipments.